

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Kekerasan merupakan salah satu bentuk pelanggaran berat dari hak asasi manusia karena dapat menyebabkan kematian. Dalam buku yang berjudul “*Civilian Secretariat for the Police Service Notice 50 of 2021 Integrated Crime and Violence Prevention Strategy for Consultation*” (2021), dijelaskan bahwa kekerasan adalah penggunaan kekuatan fisik yang disengaja yang dapat membahayakan diri sendiri, orang lain, atau kelompok tertentu yang dapat mengakibatkan cedera, kerugian psikologis, gangguan perkembangan anak, hingga kematian.

Berbicara tentang kekerasan, dalam masyarakat patriarki dengan norma konstruksi sosial seperti Indonesia, perempuan lebih mungkin mengalami kekerasan jika dibandingkan dengan laki-laki karena posisinya yang lebih rendah dalam hierarki sosial. Perbedaan posisi tersebut seakan mendukung dominasi laki-laki terhadap perempuan yang justru menimbulkan permasalahan sosial seperti kekerasan berbasis gender (Israpil, 2017).

Kekerasan berbasis gender dapat ditunjukkan melalui diskriminasi yang dialami oleh perempuan dan anak perempuan baik dalam bentuk kekerasan psikologis atau emosional, kekerasan fisik, eksploitasi ekonomi, pelecehan seksual, dan lain-lain (Organisasi Kesehatan Dunia dalam Purwanti, 2020). Merujuk pada data yang disajikan oleh SIMFONI-PPA pada tahun 2022 tercatat 29.684 kasus kekerasan di Indonesia, dimana 4.634 diantaranya adalah korban laki-laki dan 25.050 korban perempuan (Jalastoria, 2023).

Data pendukung lainnya berasal dari Komnas Perempuan pada tahun 2021 tercatat 338.496 kasus kekerasan terhadap perempuan, dimana Provinsi Jawa Barat menjadi penyumbang angka terbanyak dengan 58.395 kasus (Bayu, 2022). Bukan hanya perempuan saja, anak perempuan pun seringkali menjadi korban kekerasan dan sudah menjadi isu sosial yang diakui secara global. Pada tahun 2022 dunia digemparkan dengan maraknya kasus kekerasan terhadap anak yakni sebanyak 150

juta anak perempuan dan 73 juta anak laki-laki di bawah usia 18 tahun mengalami kekerasan (Miziara dkk., 2022).

Jika ditinjau lebih dalam lagi kasus kekerasan terhadap anak perempuan juga kian merajalela di Indonesia. SIMFONI-PPA mencatat dalam rentang Januari hingga November 2023 terdapat 16.849 kasus kekerasan terhadap anak dengan 12.158 korban anak perempuan dan 4.691 korban anak laki-laki (Biro Hukum dan Humas Kemenppa, 2024). Berdasarkan data angka kekerasan yang sudah di uraikan sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa korban kekerasan terbanyak berorientasi pada perempuan dan anak perempuan.

Menurut penulis dukungan pemerintah merupakan hal yang sangat fundamental baik dalam pencegahan maupun penyelesaiannya, dimana pemerintah dapat berperan sebagai pengambil kebijakan terhadap upaya atau strategi apa yang seharusnya dilakukan dalam mengatur, melindungi, serta menjaga perempuan dan anak perempuan dari tindak kekerasan.

Berdasarkan hasil literatur yang dilakukan oleh penulis ternyata dukungan pemerintah sudah di implementasikan lewat berbagai upaya. Upaya-upaya tersebut seperti dibentuknya Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia (LNHAM); Komnas Perempuan, KHAM, KPAI, DP3A, Kemenkumham, Pengadilan HAM, Komnas Antikekerasan terhadap Perempuan, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, dan lain-lain.

Selain LNHAM, pemerintah juga sudah membentuk berbagai peraturan seperti disahkannya UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dari tindak kekerasan, Permen Nomor 13 Tahun 2020 tentang perlindungan perempuan dan anak, UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Permen PPPA Nomor 2 Tahun 2022 tentang standar layanan perlindungan perempuan dan anak, hingga Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2022 tentang strategi nasional penghapusan kekerasan terhadap anak.

Akan tetapi segala upaya maupun strategi tersebut tampaknya belum berbuah manis dimana angka kekerasan masih mengalami peningkatan yang cukup signifikan setiap tahunnya. Disamping itu, Álvarez & Alexis, (2014)

menggambarkan kasus kekerasan sebagai fenomena gunung es, dimana data yang dilaporkan hanya mencerminkan sebagian kecil dari kenyataan sebenarnya sehingga memperumit upaya penanganan oleh pemerintah. Dapat dibayangkan betapa krusialnya situasi kasus kekerasan di Indonesia saat ini jika fenomena gunung es terus terjadi.

Jika merujuk pada fenomena gunung es, maka data angka kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan yang sebelumnya diuraikan oleh penulis ternyata belum sepenuhnya mencakup data keseluruhan di ruang lingkup masyarakat. Artinya masih banyak kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan di Indonesia yang tidak terungkap ke publik.

Dalam konteks masyarakat, fenomena gunung es terkait pelaporan kasus kekerasan seringkali muncul karena adanya kecenderungan perilaku dan budaya tertentu seperti *victim blaming* (Wahyuni dkk., 2022). Budaya *victim blaming* merupakan suatu sikap menyalahkan korban seperti pernyataan "kamu sih pakaiannya seperti itu" atau "kamu sih jalan di malam hari, pulang tengah malam".

Sikap seperti ini tidak hanya menyudutkan korban, tetapi juga menciptakan lingkungan yang tidak mendukung bagi korban untuk melaporkan kekerasan yang mereka alami. Akibatnya, korban kehilangan keberanian untuk mengungkapkan pengalaman mereka dan mempersulit proses penjangkauan pemerintah untuk menekan angka kekerasan.

Lantas bagaimana pemerintah menanggapi persoalan demikian? apakah segala upaya yang telah dilakukan mencerminkan keterlambatan pemerintah dalam merespon dan menindaklanjuti tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan di Indonesia? atau justru bentuk implementasi dari peraturan pemerintah, terikat dengan kultur budaya masyarakat sehingga melaporkan kepada pihak yang berwajib menjadi pilihan bagi para korban kekerasan.

Merujuk pada data, fakta dan argumen yang telah di uraikan sebelumnya maka strategi mitigasi komunikasi pemerintah harus segera dilakukan untuk menekan angka kekerasan di Indonesia. Adanya perbandingan antara respon

pemerintah dan faktor budaya masyarakat menjadi aspek penting untuk dieksplorasi guna memahami dinamika penanganan kekerasan secara lebih komprehensif.

Dalam buku *"International Federation of the Red Cross and the Red Crescent Societies"* (2011) dijelaskan bahwa salah satu langkah konkret yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah mencari strategi mitigasi komunikasi terbaik yang berfokus pada penurunan risiko lebih lanjut terhadap masalah tertentu sekaligus mengurangi dampaknya. Maka dapat disimpulkan bahwa untuk menanggapi tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, pemerintah harus mencari strategi mitigasi komunikasi terbaik.

Remteng dkk., & Los (2022) menambahkan bahwa strategi mitigasi komunikasi dilakukan secara bertahap mulai dari pelatihan, pembentukan kebijakan tentang berbagai aspek risiko dan konsekuensi hingga penyelesaian secara berkelanjutan dengan cara komunikasi dan kolaborasi multi arah antara berbagai pemangku kepentingan yang didukung oleh sumber daya dan tata kelola yang tepat. Maka dapat disimpulkan bahwa strategi mitigasi komunikasi dapat dilakukan secara bertahap seperti pelatihan, pembentukan kebijakan, dan evaluasi kegiatan.

Dalam buku *"Creating Safe Environments: Violence Prevention Strategies and Programs Prevention"* (2006) dijelaskan bahwa strategi mitigasi komunikasi yang efektif adalah strategi yang tetap memperhatikan pengurangan faktor risiko dengan membangun faktor ketahanan seperti pemberdayaan masyarakat yang dimulai dari desain intervensi, implementasi, dan diakhiri dengan evaluasi dengan tetap memperhatikan norma-norma sosial (Darmini 2021). Maka dapat disimpulkan bahwa strategi mitigasi komunikasi yang efektif adalah strategi yang berorientasi pada pemberdayaan terhadap masyarakat.

Secara keseluruhan, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini akan mengkaji secara mendalam bagaimana strategi mitigasi komunikasi yang dilakukan pemerintah dalam menekan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak. Agar penelitian ini semakin terarah dengan hasil analisis yang lebih komprehensif, penulis menggunakan dua teori. Pertama, teori komunikasi organisasi Karl

E.Weick, yang berfungsi sebagai payung teori. Kedua, teori komunikasi pemberdayaan masyarakat, yang berfungsi sebagai landasan teori.

Teori-teori ini diyakini dapat membantu penulis dalam memahami secara mendalam bagaimana pemerintah melakukan strategi mitigasi komunikasi untuk menekan angka kekerasan. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Bekasi, sebuah wilayah di Provinsi Jawa Barat dengan jumlah penduduk mencapai 3.246.013 jiwa (Bekasikab.bps.go.id, 2023). Adapun alasan penulis memilih daerah ini sebagai tempat penelitian dikarenakan Kabupaten Bekasi menempati peringkat pertama dengan angka kekerasan tertinggi Se-Jawa Barat.

Setelah menentukan lokasi penelitian, penulis mencoba mengkaji satu persatu tugas dari lembaga nasional hak asasi manusia yang ada di Kabupaten Bekasi untuk menentukan objek penelitian. Adapun hasil kajian tersebut mengarahkan penulis untuk melakukan penelitian di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Bekasi. Penentuan tempat dan objek penelitian akan dijelaskan lebih rinci pada subbab 2.4.

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam penelitian ini penulis akan mengeksplorasi secara mendalam tentang dua hal. Pertama, tantangan dan hambatan apa yang sebenarnya dihadapi oleh DP3A Kabupaten Bekasi dalam menekan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kedua, bagaimana strategi mitigasi komunikasi yang dilakukan oleh DP3A Kabupaten Bekasi dalam menekan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak. Sehingga judul yang diusung pada penelitian ini adalah **“Strategi Mitigasi Komunikasi Pemerintah Dalam Upaya Penekanan Angka Kekerasan (Studi Kasus Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bekasi)”**.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

1. Apa tantangan dan hambatan yang dialami oleh DP3A Kabupaten Bekasi dalam upaya penekanan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak?
2. Bagaimana strategi mitigasi komunikasi yang dilakukan oleh DP3A Kabupaten Bekasi dalam upaya penekanan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Penulis ingin mengetahui tantangan dan hambatan yang dialami oleh DP3A Kabupaten Bekasi dalam upaya penekanan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak.
2. Penulis ingin mengetahui strategi mitigasi komunikasi yang dilakukan oleh DP3A Kabupaten Bekasi dalam upaya penekanan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak.

1.4 Manfaat/Signifikansi Penelitian

Sebagai penelitian yang ilmiah, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat yang signifikan bagi penulis, pemerintah, praktisi terkait, dan masyarakat umum. Dalam penulisannya, manfaat/signifikansi penelitian terdiri dari empat aspek antara lain; segi teori, segi kebijakan, segi praktik dan segi isu/ aksi sosial. Keempat aspek tersebut akan diuraikan secara lebih rinci dalam empat sub-subbab berikut ini.

1.4.1 Segi Teori

Penelitian ini bertujuan untuk memperluas wawasan keilmuan penulis terkait teori komunikasi organisasi dan teori pemberdayaan masyarakat, khususnya dalam konteks strategi mitigasi komunikasi pemerintah dalam upaya penekanan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak. Hasil Penelitian diharapkan dapat menjadi referensi yang berharga bagi penelitian-penelitian serupa atau studi lanjutan dalam bidang ini.

Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi Program Studi Ilmu Komunikasi, khususnya dalam ranah komunikasi pemberdayaan masyarakat. Hasil penelitian diharapkan mampu memperkaya dan memperluas pemahaman mahasiswa dan akademisi terhadap aspek-aspek pemberdayaan masyarakat melalui dimensi komunikasi.

1.4.2 Segi Kebijakan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan penting dan sumber pembelajaran bagi pemerintah dalam merancang strategi mitigasi komunikasi

dalam mengatasi tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia. Dengan menelusuri temuan dan rekomendasi yang dihasilkan, diharapkan pemerintah dapat mendapatkan wawasan yang mendalam tentang pendekatan komunikasi yang efektif dalam mengurangi angka kekerasan.

1.4.3 Segi Praktik

Penelitian ini merupakan bukti konkret dari implementasi “*Sustainable Development Goals (SDGs)*” poin kelima, yang menekankan pada kesetaraan gender dan pemberdayaan terhadap perempuan dan anak. Harapannya, hasil penelitian ini dapat menjadi pertimbangan yang berharga dalam meningkatkan kompetensi komunikasi antara pemerintah, lembaga atau praktisi terkait dan masyarakat umum.

1.4.4 Segi Isu serta Aksi Sosial

Penelitian ini diinisiasi sebagai respon terhadap rasa penasaran penulis terkait dengan pertanyaan mengapa tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia cenderung tinggi, padahal pemerintah sudah melakukan berbagai upaya untuk menekan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dengan menjawab pertanyaan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat mengungkapkan apakah pemerintah sudah menerapkan strategi mitigasi komunikasi dalam menekan angka kekerasan dan bagaimana strategi tersebut diimplementasikan

1.5 Struktur Organisasi Skripsi

Penelitian ini mencakup lima bab utama, yang secara rinci melibatkan pendahuluan, kajian pustaka, metode penelitian, temuan dan pembahasan, serta simpulan, implikasi dan rekomendasi. Adapun penjelasan dari kelima bab utama tersebut antara lain: BAB I: menjelaskan tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat/signifikansi penelitian dan struktur organisasi skripsi.

BAB II: menjelaskan tentang landasan konseptual yang relevan. meliputi kajian historis kekerasan berbasis gender di Indonesia dan respon pemerintah, urgensi strategi mitigasi komunikasi pemerintah ditinjau dari teori komunikasi organisasi Karl E. Weick, komunikasi pemberdayaan masyarakat sebagai strategi

mitigasi kekerasan berbasis gender, DP3A Kabupaten Bekasi sebagai studi kasus penelitian, relevansi pustaka-pustaka rujukan, dan kerangka berpikir. BAB III: memaparkan tentang desain penelitian, partisipan dan tempat penelitian, teknik pengumpulan data, tahapan analisis data, keabsahan studi dan isu etik penelitian dan lini masa penelitian.

BAB IV: menguraikan hasil temuan penelitian untuk menjawab pertanyaan penelitian pertama dan kedua yang selanjutnya dibahas lebih mendalam dengan mengelaborasi temuan penelitian bersama studi penelitian terdahulu, teori-teori komunikasi, dan pendapat ahli. BAB V: menjelaskan simpulan, implikasi dan rekomendasi terhadap penelitian mendatang yang memiliki keterkaitan terhadap topik penelitian ini.